

Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Pendidikan Non-Formal

Inom Nasution¹, Hulga Ryan Shori², Ahmad Hanafi Sinaga³, Nadya Putri Mtd⁴, Dwi Hartina⁵, Rosa Marshanda Hrp⁶, Desma Ramadhani Sianipar⁷, Indriyani Boru Sitepu⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Manajemen Pendidikan Islam, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ryanhulga@gmail.com², nadyaputrimtd16@gmail.com⁴, dwhartina134@gmail.com⁵,
rosamarshandaharahap@gmail.com⁶, desiisianipar0708@gmail.com⁷,
indriyaniborusitepu21@gmail.com⁸

Abstrak

Perkembangan teknologi menjadi tuntutan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitasnya melalui pendidikan nonformal. Pada pelaksanaan pendidikan nonformal terdapat proses perencanaan pendidikan nonformal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pendidikan nonformal. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian, yakni pengelola Rumah BUMN, tutor atau fasilitator rumah BUMN, dan pelaku UMKM. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yakni pedoman wawancara yang berkaitan dengan proses perencanaan pendidikan nonformal. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Temuan penelitian terkait dengan proses perencanaan pendidikan nonformal yaitu adanya identifikasi kebutuhan agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan penyeleksian calon warga belajar karena pelaku UMKM memiliki beragam karakteristik sesuai kebutuhan program. Selanjutnya, penentuan program sesuai dengan kebutuhan dan penyiapan tutor untuk menjadi pendidik, penyiapan materi, dan pelatihan bagi para tutor untuk beberapa materi tertentu.

Kata Kunci: *Manajemen Pendidikan, Strategi Pendidikan, Pendidikan Nonformal*

Abstract

Technological developments are a demand for SMEs. Therefore, it is necessary to increase its capacity through non-formal education. In the implementation of non-formal education there is a non-formal education planning process. This study aims to analyze the non-formal education planning process. This research is classified as a qualitative descriptive study with research subjects, namely the manager of the BUMN House, the tutor or facilitator of the BUMN house, and the MSME actors. Data collection in the study was carried out using the methods of observation, interviews, and documentation studies. The research instrument used was interview guidelines related to the non-formal education planning process. The research data were then analyzed using qualitative descriptive analysis consisting of stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions (verification). The research findings are related to the non-formal education planning process, namely the identification of the need so that the program implemented is in accordance with the needs and selection of prospective learning citizens because MSME actors have various characteristics according to program needs. Furthermore, determining the program

according to the needs and preparing tutors to become educators, preparing materials, and training tutors for certain materials.

Keywords : *Education Management, Education Strategy, Non-Formal Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan Nonformal (PNF) pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur sekolah (pendidikan formal), baik yang berjenjang maupun tidak berjenjang, dilembagakan ataupun belum dilembagakan, berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hayat. Salah satu ciri yang membedakan dengan pendidikan formal adalah fleksibilitas dalam hal usia peserta didik, kualifikasi pendidik, waktu belajar dan tempat pembelajaran. PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal awalnya dirancang sebagai pusat, tempat dan/atau ajang belajar pendidikan masyarakat sehingga terbentuk masyarakat pembelajar (*learning society*). Oleh karena itu agar PKBM benar-benar dapat menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar, sangat diperlukan adanya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kelayakan sarana dan prasarana, penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel (Dewi & Limbong, 2018; Usman, 2017).

PKBM yang baik akan lebih responsif dan berdaya dalam melaksanakan fungsinya secara optimal, fleksibel, dan netral. Fleksibel dalam arti memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai dengan kebutuhan mereka; sedangkan yang dimaksud netral adalah memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan strata sosial, agama, budaya, gender, dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan di PKBM. Untuk mengakomodir berbagai keragaman yang ada, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada masyarakat, PKBM harus dapat merancang standar kebutuhan belajar yang diinginkan secara demokratis, efektif, efisien, dan bermutu. Hal ini perlu dilakukan PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat. Sejatinya PKBM saat ini tidak hanya sebagai tempat pembelajaran tetapi juga sebagai pusat informasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat (urusan pendidikan) pada penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; monitoring dan evaluasi; supervisi; fasilitasi; dan urusan-urusan pemerintahan yang berhubungan dengan eksternalitas nasional. Pengembangan pendidikan non formal merujuk kepada Permendiknas/Permendikbud yang sudah ada dilengkapi dengan pengaturan beberapa aspek atau sumberdaya pendidikan lainnya yang belum diatur dengan peraturan Menteri, yang dibuat fleksibel dengan memperhatikan karaktersitik dan kondisi yang ada di lingkungan pendidikan nonformal.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menurut Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM (2012), adalah prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (*Community Based Institution*). Artinya, masyarakatlah yang memegang peranan penting dalam pendirian, pengelolaan, proses pembelajaran, pengembangan dan kemajuan sebuah PKBM.

Seperti yang terjadi di sebagian besar PKBM yang ada di Indonesia, PKBM memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul pun merupakan permasalahan mendasar dari masyarakat sendiri. Keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan dana, kurangnya motivasi belajar warga belajar, kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk menuntaskan jenjang pendidikan, sulitnya mencari waktu yang pas antara tutor dan warga belajar, terbatasnya ketersediaan tutor yang kompeten, sulitnya mengurus ijin operasional, jauhnya jarak para warga belajar ke tempat belajar, kurangnya kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan, sulitnya mencari mitra kerja untuk menjalin kerja sama

dalam rangka peningkatan kualitas PKBM, merupakan beberapa permasalahan yang umum terjadi pada PKBM (Mulyono, 2018; Pamungkas et al., 2018).

Pendidikan nonformal memiliki perbedaan dengan pendidikan formal. Menurut (Sudjana, 1989) mengidentifikasi beberapa perbedaan pendidikan nonformal dari pendidikan formal, yaitu: derajat ketaatan dan keseragaman yang lebih longgar dibanding pendidikan formal memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, memiliki teknik-teknik yang berbeda dalam mendiagnosis, merencanakan, dan mengevaluasi proses, hasil dan dampak program pendidikan, tujuan pendidikan nonformal tidak seragam, tidak memiliki persyaratan ketat bagi peserta didiknya, tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan pendidikan nonformal dipikul oleh pihak-pihak yang berbeda, serta sistem penyelenggaraannya yang berbeda dari pendidikan formal (Muslimin & Kartiko, 2020; Pakpahan & Habibah, 2021).

Program-program pendidikan nonformal yang dikembangkan saat ini, merupakan hal yang menarik untuk ditelaah dan dianalisis. Hal ini terkait konsep dan ciri-cirinya yang masih menjadi perdebatan banyak orang (Dacholfany, 2018; Susanti, 2014). Beberapa kajian dan telaahan yang sering muncul, diantaranya: kondisi tenaga pendidik dan kependidikan nonformal, kondisi sasaran didik, pengembangan kurikulum pembelajaran nonformal, tingkat putus sekolah (drop out) sasaran (warga belajar), model program pembelajaran, model pengembangan materi pembelajaran, standarisasi, lembaga penyelenggaraan pendidikan nonformal, lembaga pengembang model-model pembelajaran, partisipasi masyarakat dan pemerintah, dan lain-lain.

Kontribusi pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat, secara lebih jelas dapat dilihat dari definisi dan hakekat peran pendidikan nonformal itu sendiri. Sudjana secara tegas menjelaskan tugas pendidikan nonformal: (a) membelajarkan warga belajar agar mereka memiliki dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi pemungkinan perubahan di masa depan, dan (b) membelajarkan warga belajar agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumber alam guna meningkatkan taraf hidupnya (Sudjana, 2009).

Salah satu komponen PKBM, yang memegang peranan penting dalam pengembangan PKBM adalah pengelola PKBM. Seperti yang telah ditetapkan dalam Standar dan prosedur penyelenggaraan PKBM, pengelola PKBM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, memiliki dedikasi yang tinggi pada pendidikan dan bertanggung jawab, memiliki jaringan yang luas, memiliki kemampuan teknis di bidang pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelola PKBM akan mampu menyusun strategi yang tepat, terutama dalam rangka mengatasi setiap perubahan yang terjadi, jikadidukung fungsi manajerial yang tangguh. Salah satu bidang fungsional strategisyang harus menjadi perhatian pengelola adalah manajemen sumber daya manusia. Jika PKBM ingin berkembang menjadi PKBM yang profesional dan berorientasi ke depan, maka berikut ini dikembangkan strategistrategi sumber daya manusia yang dapat menggerakkan PKBM menjadi lebih profesional: strategi rekrutment dan seleksi, strategi perencanaan sumberdaya manusia, strategi pelatihan dan pengembangan, strategi penilaian kinerja, strategi kompensasi dan strategi manajemen-staf/karyawan. (Kamil, 2009) .

Menerapkan konsep strategi pengelolaan PKBM dimulai dari melakukan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan program kegiatan yang komprehensif, yaitu perencanaan program yang mampu mengantisipasi kebutuhan yang bervariasi dan luas, untuk jangka panjang, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dan paling baik untuk mencapai tujuantujuan program.

Beberapa strategi dasar yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber-sumber agar efektif dan efisien, yaitu (Bahri & Arafah, 2020): (a) berikan pemahaman melalui pelatihan kecil kepada warga belajar, tutor, fasilitator, masyarakat tentang program yang akan dikembangkan dan menjadi tanggungjawabnya;

(b) berikan kepercayaan penuh kepada pengelola program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program sampai pada pengontrolan dan evaluasi; (c) kembangkan kerjasama dan kemitraan yang erat dan terbuka dengan pihak-pihak tertentu atau masyarakat (tokoh masyarakat) yang potensial dapat dilibatkan dalam pengembangan dan pengendalian program. Jika memungkinkan dengan pemerintah, pihak swasta dan sponsor lainnya; (d) gunakan barang, bahan, alat yang sesuai kebutuhan pengembangan program; (e) berikan kesempatan kepada pengelola program atau masyarakat untuk membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusannya; (f) gunakan tim keuangan dari luar untuk mengontrol pembiayaan agar mandiri; (g) maksimalkan sumberdaya yang ada di PKBM dalam pengembangan dan pengendalian program; (h) kembangkan materi pembelajaran yang lebih tematik, lokal, sehingga sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat dan kebutuhan warga belajar; (i) partisipasi warga belajar.

METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wana Bhakti Desa Ngasem Rt.05/Rw.02 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pada tanggal 26 Juli 2021, peneliti datang ke Lembaga untuk meminta izin untuk memahami latar penelitian yang sebenarnya di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. 2) Pada tanggal 27 Juli 2021 peneliti melakukan observasi di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Yang dilakukan peneliti yaitu mengamati lingkungan Lembaga. 3) Pada tanggal 28 Juli 2021 peneliti melakukan wawancara dengan Ketua PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. 4) Pada tanggal 1 Agustus 2021 peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. 5) Pada tanggal 2 Agustus 2021 peneliti melakukan penelitian di lingkungan sekolah untuk memahami latar penelitian sebenarnya. 6) Pada tanggal 3 Agustus 2021 peneliti mulai mengumpulkan dokumen selengkap-lengkapya sesuai tema dan permasalahan penelitian. 6) Melaksanakan penelitian ataupun kunjungan sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai dengan selesai penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan strategi disusun untuk mempersiapkan masa depan sebuah organisasi. Perencanaan merupakan salah satu kegiatan manajerial dalam mengelola sebuah organisasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan mendasar tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, perencanaan merupakan salah satu langkah awal dalam proses manajemen strategik dalam pengembangan pendidikan lembaga pendidikan.

Analisis Lingkungan Internal PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem

Kabupaten Bojonegoro

Pada observasi yang dilakukan tanggal 26 Juli 2021, peneliti mengamati keadaan fisik lembaga. Dilihat dari luar kantor / sekretariat PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro terlihat kecil dan biasa. Itu karena Lembaga tidak memiliki prasarana sendiri. Fasilitas lainnya adanya wifi gratis yang dapat diakses di dalam lingkungan lembaga.

Pengamatan dan penilaian terhadap lingkungan lembaga dapat membantu ketua lembaga dalam

menemukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sekolah serta ancaman dan peluang yang mungkin timbul. Dalam melakukan analisis tersebut, dibutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan. Melalui analisis internal dan eksternal sekolah, juga membantu ketua lembaga mengenal program-program dan pencapaian prestasi pada awal kepemimpinannya. Berikut pernyataan Bapak Suwondo, SE.MM. :

Pada awal kepemimpinan saya terlebih dahulu melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah, yang mana pada saat itu saya masih baru, kurang lebih sekitar lima tahun lebih saya menjadi kepala PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Langkah pertama yang saya lakukan ketika bertugas menjadi ketua lembaga, saya terlebih dahulu belajar dari ketua lembaga yang lama, bagaimana beliau tersebut memimpin lembaga hingga bisa mencapai prestasi yang membanggakan, program-program apa yang sudah tercapai dan yang masih berjalan. Melalui observasi tersebut saya bisa mengetahui bagaimana ketua lembaga sebelumnya bisa berhasil menjalankan program-programnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjalankan program selanjutnya. Untuk menyamakan persepsi saya dan para tutor serta pengelola lainnya selalu berkordinasi dalam menyusun program kegiatan apapun, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara ketua lembaga dengan tutor serta pengelola. Sumber daya manusia atau tutor bekerja sesuai bidangnya masing-masing, dan untuk meningkatkan kualitas tutor mengadakan kelompok kerja tutor seminar, workshop, pelatihan, pembekalan sesuai dalam bidangnya dan Dinas Pendidikan juga melakukan seleksi tutor melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pernyataan dari ketua lembaga tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Kawan, S.Pd. selaku sekretaris mengatakan:

“Pada awal kepemimpinannya, bapak ketua lembaga selalu koordinasi dengan mitra kerjanya diantaranya tutor, dan ketua lembaga selalu memberikan arahan, motivasi kepada mitra kerjanya, sehingga bentuk komunikasi ketua lembaga dengan tutor sangat baik, dengan demikian dengan adanya koordinasi yang baik maka bisa membuat persepsi yang sama yang bertujuan untuk memajukan dan pengembangan pendidikan non formal di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”.

Awal mula kepemimpinannya ketua lembaga untuk mengetahui situasi dan kondisi lembaga, ketua lembaga melakukan observasi atau pengamatan sendiri sehingga ketua lembaga bisa tahu kondisi lembaga dengan demikian bisa tahu apa yang hendak dilaksanakan guna untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan non formal di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Untuk tenaga pendidik atau tutor di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sekitar 52 tutor kualifikasi pendidikan semua sudah strata S1/ sarjana dan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Implementasi Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal

Implementasi strategi merupakan wujud nyata dari strategi yang telah dirumuskan. Hal tersebut diwujudkan melalui tindakan pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.

1. Pembelajaran Dalam Jaringan

Dalam mengembangkan pendidikan non formal, program pembelajaran daring tersebut memiliki ciri khas pembelajaran tersendiri. Dalam konteks kekinian, program tersebut dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran non tatap muka secara langsung, selain sebagai tuntutan

pembelajaran dalam masa pandemic covid-19.

Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan jaringan internet. Prinsip dasar pelaksanaan pembelajaran daring dengan pola tatap muka, tutorial, dan mandiri mengacu pada Permendiknas No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan paket A, paket B, dan Paket C.

Jenis pembelajaran daring ada 3 jenis yaitu:

a) Tatap muka daring

Pembelajaran tatap muka daring yang digunakan adalah teleconference secara audio/ video conference dan dipadukan dengan chatting. Syarat tatap muka daring adalah terjadinya komunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan secara langsung (synchronous) antara tutor dengan warga belajar, maupun antarsesama warga belajar. Dengan demikian di saat yang bersamaan masing-masing pihak harus log in. Setiap proses pembelajaran selalu diawali dengan kegiatan pendahuluan, dilanjutkan kegiatan inti dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Tutor hendaknya dapat melakukan log in lebih dulu dibandingkan warga belajar.

b) Tutorial Daring

Tutorial daring dilakukan melalui forum diskusi dan komunikasi melalui surat elektronik (surel), yang disediakan dalam aplikasi. Untuk membahas sebuah tema atau topik tertentu yang menjadi kesulitan warga belajar, tutor menyediakan waktu di forum diskusi dan surel. Tema diskusi sudah ditetapkan tutor dan diurutkan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan SKK yang telah ditetapkan.

Waktu pembahasan diatur sesuai kesepakatan dan tingkat kesulitan yang dihadapi warga belajar. Pemecahan masalah dan penyimpulan tidak selalu harus berasal dari tutor. Semua warga belajar mendapat kesempatan untuk ikut berdiskusi dalam forum, memberikan masukan, solusi bahkan simpulan atas tema yang dibahas. Tutor berperan sebagai fasilitator dan memberikan penguatan. Tutor dapat menutup forum diskusi untuk beralih ke tema lain, jika pembahasan tema tertentu dianggap sudah cukup dan memperoleh simpulan.

c) Mandiri Daring

Pembelajaran mandiri diterapkan dan diberlakukan pula di pembelajaran daring. Demikian juga dengan kontrak belajar yang harus dilakukan antara tutor dengan warga belajar. Beberapa kompetensi dasar yang dimandirikan disiapkan kontrak belajar. Setelah kontrak belajar ditandatangani warga belajar, tutor menyiapkan modul, media, soal-soal ulangan dan penugasan, termasuk jadwal pengumpulan tugas dan jadwal ulangan melalui jaringan.

Warga belajar dapat mengunduh sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Pengumpulan tugas dapat dilakukan melalui surel (email). Batas waktu pengumpulan tugas dituangkan dalam kontrak belajar mandiri. Tutor menuliskan batas waktu pengumpulan ini dalam fitur pengumuman di aplikasi internet sehingga warga belajar akan merasa terus diingatkan.

Evaluasi dan Pengawasan Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal

Evaluasi strategi merupakan langkah pengendalian untuk memastikan bahwa dalam implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau untuk memastikan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Dalam evaluasi strategi perlu membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai untuk memberikan umpan balik atau tindakan perbaikan. Evaluasi dan pengawasan strategi yang dilakukan oleh ketua lembaga PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro adalah melalui pengamatan langsung jalannya program atau kegiatan lembaga dan melalui laporan pertanggung jawaban setiap program atau kegiatan.

d) Supervisi Program atau Kegiatan Sekolah

Ketua PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro menerapkan supervisi atau pengawasan pada setiap program atau kegiatan lembaga. Supervisi yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses berlangsungnya kegiatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

e) Supervisi akademik

Supervisi akademik dilakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran dalam jaringan. Supervisi ini juga dilakukan untuk membantu tutor dalam menjalankan tugasnya. Supervisi akademik dilakukan oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dilakukan sewaktu-waktu secara berkala. Melalui kegiatan supervisi ini, kegiatan pembelajaran dalam jaringan yang menjadi perhatian pertama dalam meningkatkan mutu pendidikan, diharapkan dapat berjalan secara efektif.

f) Supervisi Mou Desa Binaan

Supervisi Mou Desa Binaan adalah pengawasan yang dilakukan kepala sekolah dengan sasaran pengawasan kegiatan dan pelayanan pendidikan masyarakat di tingkat desa binaan. Karena kegiatan desa binaan memiliki dampak terhadap kegiatan belajar mengajar di tingkat desa binaan, sehingga supervisi ini diperlukan oleh kepala

g) Supervisi Pendidikan Gratis

Supervisi pendidikan gratis adalah pengawasan yang dilakukan kepala satuan lembaga dengan sasaran pengawasan kegiatan pembiayaan pendidikan masyarakat. Memastikan jika sudah tidak ada lagi peserta didik yang dipungut biaya, kegiatan ini berdampak pesat pada pengembangan pendidikan non formal di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Cara Meningkatkan Efektifitas Pengembangan Pendidikan Non Formal

Pendidik dan tenaga kependidikan non formal adalah anggota masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil, melakukan, pembimbingan dan pelatihan pada satuan pendidikan non formal.

Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan non formal merupakan pekerjaan yang mudah, walaupun pendidikan non formal sebetulnya lebih tua dari pada pendidikan formal. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pendidikan non formal dalam pengembangan kualitas dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan non formal maupun komunitas pendidikan non formal yaitu :

- 1) Perlu menata konsep yang tepat tentang program-program pendidikan non formal

- 2) Perlu merencanakan program pendidikan non formal berbasis kebutuhan nyata belajar
- 3) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara tekun dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas. Sehingga pelaksanaan program pendidikan non formal bukan lagi bersifat sebagai sebuah proyek. Dimana ada dana disitu ada program, hal seperti inilah yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program pendidikan non formal

Untuk meningkatkan efektifitas pendidikan non formal dalam hal pengembangan kualitas maka diperlukan upaya penataan ketenagaan yang baik dari segi pendidikan maupun tenaga kependidikan pendidikan non formal yang lebih profesional yang mampu menata konsep yang tepat tentang pendidikan non formal dan dapat merencanakan program pendidikan non formal yang berbasis kebutuhan dan membangun kelembagaan non formal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, paparan data, dan temuan dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan lembaga. Terdapat lima tahapan pokok perumusan strategi pengembangan pendidikan Non Formal di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, yaitu: 1) Perumusan visi, misi dan tujuan; 2) Analisis lingkungan eksternal; 3) Analisis internal organisasi; 4) Perumusan tujuan khusus; 5) Penentuan strategi. 6) Implementasi strategi (strategic implementation) adalah metode yang digunakan untuk mengoperasionalkan atau melaksanakan strategi dalam organisasi. Implementasi strategi pengembangan pendidikan Non Formal di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yaitu: 1) Pembelajaran Dalam Jaringan 2) Desa Binaan. 3) Pendidikan Gratis, 4) Sosialisasi Promosi, 5) Evaluasi dan pengawasan strategi pengembangan pendidikan Non Formal di PKBM Wana Bhakti Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yaitu: A) Supervisi Program atau Kegiatan Sekolah, B) Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianingsih. (n.d.). Full Day School; Model Alternatif Pembelajaran Karakter di Sekolah, dalam Prosiding Seminar Nasional Repositioning Full Day School, Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal,. Malang UM Press, 2016., 1–5.
- Bahri, S., & Arafah, N. (2020). Analisis Manajemen SDM Dalam Mengembangkan Strategi Pembelajaran Di Era New Normal. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 1(1), 20–40. <https://doi.org/10.31538/tijie.v1i1.2>
- Dacholfany, M. I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non-Formal. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(1), 43–74.
- Dewi, R., & Limbong, J. (2018). Manajemen Pendidikan Diniyah Formal. *Madrassa: Journal of Islamic Educational Management*, 1(0), 23–29. <https://doi.org/10.32940/mjiem.v1i0.51>
- Himayaturahmah, E. (2017). Strategi Pengembangan Manajemen Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Di Provinsi Riau. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 100– 110.
- Mulyono, D. (2018). The Strategy Of Managers In Moving Business Learning Group

- Program In PKBM Srikandi Cimahi City. *Journal of Educational Experts (JEE)*, 1(1), 37–44.
- Muslimin, T. A., & Kartiko, A. (2020). Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah Bertaraf Internasional Nurul Ummah Pacet Mojokerto. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 75–87.
<https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/30>
- Pakpahan, P. L., & Habibah, U. (2021). Manajemen Program Pengembangan Kurikulum PAI dan Budi Pekerti dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa: Management of IRE Curriculum Development Program and Character in Forming Student's Religious Character. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.31538/tijie.v2i1.19>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(3), 303–309.
- Rimbarizki, R., & Susilo, H. (2017). Penerapan pembelajaran daring kombinasi dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik paket C vokasi di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Pioneer Karanganyar. *J+ Plus Unesa*, 6(2).
- Susanti. (2018). Efektivitas Pendidikan Non Formal Dalam Pengembangan Kualitas Sumber daya Manusia. *Jurnal Pendidikan*, 1(6), 13-14